



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARJAYA**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **215999**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.661.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/154 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/60 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/1 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, WARISAN Rp. 152.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/1 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/1 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	479.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	120.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.776.513.626
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.037.013.626
III. HUTANG	Rp.	522.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.514.613.626

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.